

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF BAGI KALANGAN PELAJAR DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Novera J. Batalipu^{1)*}, Selamat Riadi²⁾, Fachrul Reza³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*noverajbatalipu11@gmail.com*](mailto:noverajbatalipu11@gmail.com)

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*riadicante@gmail.com*](mailto:riadicante@gmail.com)

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*rezadakwah123@gmail.com*](mailto:rezadakwah123@gmail.com)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di kalangan pelajar masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan agar penyalahguna narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian terdiri atas tiga pelaksana kebijakan pada Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan satu orang tua pelajar yang menjalani rehabilitasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar belum berjalan optimal. Aspek komunikasi belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Pada aspek sumber daya masih terdapat keterbatasan tenaga profesional, anggaran, fasilitas rehabilitasi rawat inap, dan sarana operasional. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, aspek struktur birokrasi masih menghadapi kendala berupa standar operasional prosedur yang bersifat umum serta koordinasi dengan pihak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, dan penyempurnaan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi, Narkoba, Psikotropika, Pelajar

ABSTRACT

Drug, psychotropic, and addictive substance abuse among students remains a challenge in the implementation of rehabilitation policies in Indonesia. Students are considered a vulnerable group due to their developmental stage, which is characterized by a high level of curiosity, identity exploration, and susceptibility to social influences. The National Narcotics Board (BNN) implements rehabilitation policies as an effort to restore drug abusers so that they can resume their social functions optimally. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation policies for narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances among students by the National Narcotics Board of Central Sulawesi Province. This research employed a qualitative approach using a case study design. The analysis was based on George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants consisted of three policy implementers from the Rehabilitation Division of the National Narcotics Board of Central Sulawesi Province and one parent of a student undergoing rehabilitation. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the rehabilitation policy for students has not yet been optimal. In terms of communication, information dissemination has been conducted through socialization programs, the Field Screening and Intervention Program (SIL), coordination with schools, and various information media; however, it has not reached all target groups evenly. Regarding resources, the implementation is constrained by a shortage of professional personnel, multiple job assignments, limited budgets, the absence of inpatient rehabilitation facilities, and inadequate operational facilities. In the disposition dimension, policy implementers demonstrated commitment, support, and positive attitudes toward the implementation of the policy. Meanwhile, the bureaucratic structure dimension still faces challenges, including general standard operating procedures, changes in the rehabilitation organizational structure, and administrative as well as coordination issues with schools. Therefore, strengthening communication, improving resources, and refining the bureaucratic structure are necessary to ensure that the implementation of rehabilitation policies for students can be carried out more optimally.

Keywords: Policy Implementation, Rehabilitation, Narcotics, Psychotropics, Students

Submisi: 11-07-2026
Diterima: 12-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) masih menjadi salah satu permasalahan publik yang berdampak pada aspek hukum, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, serta menurunkan kualitas hidup dan fungsi sosial individu. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga melalui rehabilitasi sebagai upaya pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial agar penyalahguna dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal di masyarakat (Badan Narkotika Nasional, 2025). Dalam praktik kebijakan di Indonesia, istilah *narkoba* lebih umum digunakan untuk merujuk pada narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), sebagaimana digunakan dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah (Putra et al., 2023).

Penyalahgunaan narkoba telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar yang merupakan kelompok rentan karena berada pada fase perkembangan remaja dengan karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi, proses pencarian jati diri, serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan (Nazhiroh et al., 2023). Penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga menghambat proses pendidikan, perkembangan psikologis, dan kehidupan sosial di masa depan. Menurut World Health Organization (WHO), remaja berada pada rentang usia 10–19 tahun, sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan remaja sebagai individu berusia 10–24 tahun yang belum menikah (Putri Elise, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelajar memerlukan perhatian khusus dalam implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, penyalahgunaan narkoba masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (2025) menunjukkan bahwa capaian layanan rehabilitasi selama periode 2023–2025 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tingginya capaian layanan rehabilitasi belum menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan optimal. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari jumlah penerima layanan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu strategi pemulihan penyalahguna narkoba sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar masih menghadapi beberapa kendala, antara lain penyampaian informasi yang belum menjangkau seluruh kelompok sasaran, keterbatasan tenaga profesional, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi, serta

standar operasional prosedur yang masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus rehabilitasi bagi kalangan pelajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar belum berjalan optimal.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi telah dilakukan oleh Kevin Repol Sibarani (2023) dan Destia, Samin, dan Setiawan (2023). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada Badan Narkotika Nasional tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran penyalahguna narkoba secara umum.

Penelitian ini dilakukan, yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar pada Badan Narkotika Nasional tingkat Provinsi menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III melalui pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah agar implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar dapat berjalan lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu kasus secara intensif, mendalam, dan menyeluruh pada suatu objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan fokus pada implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba bagi kalangan pelajar. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi, konselor adiksi, penyuluh narkoba, dan orang tua pelajar yang menjalani rehabilitasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Analisis data penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang kredibel, penelitian ini menerapkan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN BERDASARKAN TEORI EDWARD III

Implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba bagi kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Melalui analisis terhadap masing-masing variabel, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan rehabilitasi

telah dilaksanakan serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, komunikasi mencakup tiga dimensi, yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Ketiga dimensi tersebut menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi, antara lain kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan, Program Skrining Intervensi Lapangan (SIL), koordinasi dengan sekolah, pemanfaatan media sosial, serta layanan *call center* rehabilitasi. Berbagai media tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman pelajar, orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai proses pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi dan melibatkan kerja sama dengan sekolah maupun instansi terkait sehingga informasi mengenai layanan rehabilitasi dapat diterima oleh kelompok sasaran. Meskipun demikian, penyebaran informasi belum menjangkau seluruh sekolah secara merata karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu pelaksanaan sosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat pelajar maupun orang tua yang belum memahami prosedur rehabilitasi serta masih menganggap rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai proses pemulihan.

Dimensi transmisi, penyampaian informasi mengenai kebijakan rehabilitasi telah dilakukan melalui berbagai media komunikasi sehingga menunjukkan adanya upaya BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat. Namun, belum meratanya pelaksanaan sosialisasi menyebabkan penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran. Pada dimensi kejelasan, informasi mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur rehabilitasi telah disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga membantu masyarakat memahami bahwa rehabilitasi merupakan bentuk intervensi kesehatan dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Akan tetapi, masih kuatnya stigma negatif di masyarakat menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, pada dimensi konsistensi, penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan media informasi. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, meskipun frekuensi sosialisasi belum dapat dilakukan secara merata di seluruh sekolah.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh tersampainya informasi, tetapi juga oleh tingkat

pemahaman dan penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, meskipun berbagai media komunikasi telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan sosialisasi dan masih adanya stigma masyarakat terhadap rehabilitasi sehingga tujuan penyampaian informasi belum sepenuhnya tercapai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Kevin Repol Sibarani (2023) yang menyatakan bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan rehabilitasi karena penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Destia, Samin, dan Setiawan (2023) yang menemukan bahwa komunikasi dan koordinasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Dengan demikian, BNN Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperluas jangkauan sosialisasi, memperkuat koordinasi dengan sekolah, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital agar informasi mengenai rehabilitasi dapat diterima secara lebih luas sehingga implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar dapat berjalan lebih optimal.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Tenaga pelaksana rehabilitasi terdiri atas konselor adiksi, dokter, serta pegawai yang terlibat dalam proses asesmen dan rehabilitasi. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi juga didukung oleh anggaran operasional dan pemanfaatan Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA) untuk mendukung administrasi layanan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga profesional sehingga beberapa pegawai harus merangkap tugas. Di samping itu, belum tersedianya fasilitas rehabilitasi rawat inap dan keterbatasan anggaran turut memengaruhi pelaksanaan rehabilitasi bagi kalangan pelajar.

Berdasarkan teori Edward III, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun BNN Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi, keterbatasan tenaga profesional, fasilitas, dan anggaran menunjukkan bahwa aspek sumber daya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan layanan rehabilitasi yang belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan kelompok sasaran secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kevin Repol Sibarani (2023) dan Destia, Samin, dan Setiawan (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan dukungan anggaran, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai agar implementasi kebijakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar dapat berjalan lebih optimal.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pelaksana memiliki komitmen, integritas, dan pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan rehabilitasi bagi kalangan pelajar. Hal tersebut terlihat dari kesediaan petugas memberikan pendampingan kepada klien sejak proses asesmen, pelaksanaan rehabilitasi, hingga pemantauan pascarehabilitasi. Selain itu, pelaksana juga menerapkan prinsip pelayanan yang tidak diskriminatif serta menjaga kerahasiaan identitas klien sehingga memberikan rasa aman bagi pelajar dan keluarga selama mengikuti program rehabilitasi. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, para pelaksana tetap berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori Edward III, disposisi yang ditunjukkan oleh pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan. Komitmen, sikap kooperatif, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaksana menunjukkan bahwa aspek disposisi telah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Sikap tersebut turut membantu proses rehabilitasi sehingga pelaksanaan kebijakan tetap dapat berlangsung meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan melalui pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional prosedur (SOP). Menurut Edward III, struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, serta standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi. Setiap pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing, mulai dari proses asesmen, rehabilitasi, hingga pemantauan pascarehabilitasi. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, dan instansi terkait untuk mendukung proses rehabilitasi pelajar. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar operasional prosedur yang digunakan masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mekanisme rehabilitasi bagi kalangan pelajar. Di samping itu, perubahan struktur pelaksana rehabilitasi serta kendala administrasi dan koordinasi dengan pihak sekolah masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan teori Edward III, struktur birokrasi yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh adanya struktur organisasi dan SOP, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme kerja serta koordinasi antarpelaksana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi belum berjalan optimal karena meskipun telah memiliki pedoman pelaksanaan, SOP yang masih bersifat umum dan belum adanya pengaturan khusus mengenai rehabilitasi bagi kalangan pelajar menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab

kebutuhan kelompok sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan prosedur pelaksanaan serta penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kevin Repol Sibarani (2023) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan rehabilitasi. Oleh karena itu, penyempurnaan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi dengan lembaga pendidikan, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi pelajar diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teori George C. Edward III menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui sosialisasi, Program Skrining Intervensi Lapangan (SIL), koordinasi dengan sekolah, media sosial, dan *call center* rehabilitasi. Namun, keterbatasan jangkauan sosialisasi serta masih adanya stigma masyarakat terhadap rehabilitasi menyebabkan informasi belum diterima secara merata oleh kelompok sasaran.

Aspek sumber daya, pelaksanaan rehabilitasi telah didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, tetapi masih terdapat keterbatasan tenaga profesional, fasilitas rehabilitasi rawat inap, serta dukungan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi sehingga menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi. Adapun pada aspek struktur birokrasi, meskipun telah tersedia struktur organisasi, pembagian tugas, dan standar operasional prosedur, masih terdapat kendala berupa SOP yang bersifat umum serta koordinasi dengan pihak sekolah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi kalangan pelajar.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan komunikasi melalui perluasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dan dukungan anggaran yang memadai, serta penyempurnaan standar operasional prosedur dan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif bagi kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah agar berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2019). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi

- Penyalahguna Narkotika (Edisi Revisi Maret 2025). Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). USA: SAGE Publications.
- Destia, R., Samin, R., & Setiawan, R. (2023). Implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 36-45. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1317>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congressional Quarterly Press.
- Hadiansyah, I., et al. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Ruswati, R., Riadi, S., & Muhammad, H. (2021). Implementasi kebijakan layanan rehabilitasi rawat jalan pada Klinik Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 9(1), 10-25. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2291036?utm_source
- Sibarani, K. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (Skripsi)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

TENTANG PENULIS

Nama Novera J. Batalipu dengan stambuk B10122014, mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.